

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada umumnya sektor publik dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat masyarakat baik itu dalam hal pengadaan barang maupun jasa kepada publik dan biasanya dibayar melalui pajak atau penghasilan negara yang diatur melalui regulasi yang berlaku, tetapi dalam beberapa keadaan sektor publik juga ada yang dijalankan dengan menggunakan sumber permodalan dari sumbangan atau kas. Kehadiran sektor publik di masyarakat merupakan suatu kebutuhan (Mahsun, 2017). Hanya saja akhir-akhir ini sektor publik sering terpaku pada hal-hal yang sudah rutin dan seolah-olah telah berjalan baik, padahal masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan baik itu dalam hal efisiensi, efektifitas serta kualitas, salahsatunya melalui inovasi. Sektor publik diharuskan menghasilkan produk jasa berupa pelayanan publik. Sektor publik juga harus menjadikan inovasi sebagai aktivitas inti, dikarenakan inovasi mampu membantu layanan publik dalam meningkatkan kinerja, nilai publik, menanggapi harapan masyarakat serta beradaptasi dengan kebutuhan pengguna, dan meminimalkan biaya (Mulgan & Albury, 2003).

Berbicara mengenai pelayanan publik berkaitan pula dengan pelayanan kesehatan karena, salahsatu bagian dari pelayanan yang harus disediakan oleh pemerintah adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini bisa diberikan secara langsung oleh pemerintah maupun melalui kerjasama dengan pihak lain atau swasta. Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, penyembuhan berbagai macam penyakit, serta upaya preventif dari berbagai penyakit yang bisa muncul kapan saja, maka perlu adanya perbaikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Mustofa et al., 2017).

Salahsatu jenis pelayanan upaya kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan lingkungan yang didalamnya ada inspeksi dan intervensi kesehatan lingkungan serta Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Berbicara mengenai sanitasi serta pelayanan dan pembangunannya di negara kita, erat kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs tersebut telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta bagian dari pemaparan nawacita sebagai visi dan misi Presiden. Didalamnya terdapat empat pilar fokus pembangunan diantaranya pilar ekonomi, pilar sosial, pilar hukum, pilar lingkungan dan tata kelola. Pada pilar pembangunan lingkungan tercantum salahsatu tujuannya yaitu “Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua”.

Tujuan tersebut memiliki delapan target, salahsatunya “Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan” (Jusuf & Darajati, 2017). Tujuan pembangunan mengenai sanitasi tersebut tentunya tidak seketika saja dirumuskan jika tidak ada permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan data bahwa keadaan sanitasi di Indonesia dari skala nasional sampai desa, ternyata masih sangat perlu perhatian dan diperlukan peningkatan pelayanan untuk mewujudkan target pembangunan tersebut. Dilansir dari nawasis.org sebuah platform yang menyajikan data, informasi dan kapasitas mengenai sektor perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi. Menunjukkan bahwa Indonesia pernah menempati peringkat kedua terburuk akses di ASEAN pada tahun 2017. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan dalam bentuk presentase, bahwa rumah tangga yang bisa mengakses layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Indonesia berada pada angka 66,57% pada tahun 2019 (BPS, 2019).

Jawa Barat sebagai provinsi yang berpenduduk sebanyak 47.586.943 jiwa (ditjendukcapil, 2021) terbanyak di Indonesia, tidak terlepas dari permasalahan sanitasi. Data monitoring dan evaluasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tahun 2021 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menunjukkan 143.729 keluarga masih melakukan

prilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Angka ini ketiga tertinggi dibanding dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Kemudian Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah penduduk kesebelas terbanyak di Jawa Barat, masih mengalami beberapa permasalahan mengenai sanitasi salahsatunya dalam prilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Bersumber pada data laporan Bidang Promosi & Hygiene Sanitasi Dinas Kesehatan & Pengendalian Penduduk Tahun 2019 dari jumlah kepala keluarga sebanyak 542.474, yang menggunakan jamban sharing komunal adalah sebanyak 95.501, yang menggunakan jamban sehat semi permanen berjumlah 128.389, dan yang menggunakan jamban sehat permanen berjumlah 217.891 kepala keluarga. Kemudian pada tahun 2019 dari 351 desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, hanya 331 desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sisanya 20 desa tidak ada keterangan. Dari 331 desa yang mengikuti STBM tersebut diketahui bahwa desa yang melakukan Stop BABS sebanyak 183 desa, artinya masih (52,14%) dari jumlah keseluruhan (Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2019). Permasalahan BABS tersebut tentunya terjadi juga di beberapa daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Kecamatan Pagerageung sebagai salahsatu kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yang pernah mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) diare pada tahun 2017. Setelah dilakukan survey ke rumah-rumah pasien ternyata kebanyakan dari mereka masih belum memiliki akses jamban sehat permanen, sehingga masih banyak yang melakukan prilaku

BABS dan menjadi penyebab terjadinya KLB Diare pada saat itu. Mengingat betapa berbahayanya penyakit-penyakit yang timbul dikarenakan sanitasi yang buruk, seperti kolera, infeksi pernapasan akut, *schistosomiasis*, tifoid bahkan stunting pun bisa disebabkan oleh sanitasi yang buruk. Maka Puskesmas Pagerageung sebagai salahsatu pelaksana pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mengadakan sebuah inovasi guna meminimalisir permasalahan tersebut supaya tidak terulang lagi. Mengingat bahwa puskesmas merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat, salahsatunya melalui edukasi pola hidup sehat di masyarakat (Mustofa et al., 2017). Adapun inovasi tersebut bernama Jamban Idaman Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya (JIMAT).

Dirintis sejak tahun 2015 dan digencarkan tahun 2017, UPTD Puskemas Pagerageung memperkenalkan strategi dalam meningkatkan akses dan kepemilikan jamban yang layak dan memenuhi standar kesehatan yaitu Jamban Idaman Masyarakat (JIMAT). JIMAT merupakan septiktank yang berbentuk silinder, dibuat dan dicetak langsung menyatu didalam tanah dan kedap air, yang dalam pengerjaannya dikerjakan oleh tenaga ahli binaan *Water and Sanitation Program* (WSP) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Inovasi ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 03 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Kemenkes RI, 2014) yang diperkuat dengan Keputusan Bupati nomor 55 Tahun 2017 tentang Gerakan Stop

Buang Air Besar Sembarangan dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Dengan *output* nya agar masyarakat mengetahui dan memahami bahwa kepemilikan jamban yang sehat sangatlah mudah, aman dan terjangkau, serta mendongkrak akses sanitasi dan kepemilikan jamban yang sesuai dengan standar kesehatan. Adapun *outcome* nya adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator menurunnya angka kesakitan akibat penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, cacangan, hepatitis, stunting (UPTD Puskesmas Pagerageung, 2021).

Dalam pelaksanaannya tersebut berhasil memberikan kontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs); menurunkan angka stunting dari 620 (2019) menjadi 459 (2020), berhasil membawa Kabupaten Tasikmalaya menjadi Kabupaten Sehat dengan Akses Sanitasi diatas 60% pada 2018, berhasil lolos verifikasi kabupaten sehat dengan akses sanitasi diatas 80% pada tahun 2021. Meskipun dalam pelaksanaannya mengalami peningkatan dan kemajuan, tetapi inovasi program JIMAT ini masih terkendala beberapa hal. Pertama, faktor geografis beberapa wilayah di Kecamatan Pagerageung seperti di daerah Cipacing, yang mana jika dilakukan penggalian tanah baru sedalam 1 meter air sudah keluar sehingga mempersulit untuk dibuatkan septiktank. Kedua, belum masuknya inovasi JIMAT kedalam Alokasi Dana Desa (ADD). Sejauh ini dalam pelaksanaannya berbagai kebutuhan pengeluaran itu masih ditanggung oleh inovator. Besar harapan dari pihak UPTD Puskemas Pagerageung semoga inovasi JIMAT ini bisa segera

dimasukkan kedalam ADD, supaya lebih meningkatkan pemerataan akses jamban sehat. Karena sejauh ini memang ada beberapa masyarakat yang belum memiliki akses jamban sehat itu dikarenakan terhambat oleh faktor ekonomi. Jika sudah masuk kedalam ADD maka masyarakat bisa memiliki jamban sehat tanpa harus melalui kredit.

Berdasarkan pemaparan di muka, peneliti terdorong untuk menjalankan penelitian lebih dalam tentang bagaimana penerapan inovasi JIMAT serta mengetahui berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan inovasi ini. Untuk itu peneliti mengambil judul **“Inovasi Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Pagerageung Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk (Studi Kasus Inovasi Jamban Sehat Idaman Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya)”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di muka, teridentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Faktor geografis lingkungan dan faktor ekonomi masyarakat menjadi salahsatu penyebab masyarakat belum memiliki akses jamban sehat permanen
- b. Belum dimasukkannya inovasi Jamban Idaman Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya (JIMAT) kedalam Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga segala keperluan kebutuhan masih ditanggung oleh pihak inovator dan puskesmas.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan inovasi Jamban Idaman Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya (JIMAT) ?
- b. Faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi penerapan inovasi Jamban Idaman Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya (JIMAT) ?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan inovasi Jamban Idaman Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya (JIMAT)
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan inovasi Jamban Idaman Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya (JIMAT)

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Ada beberapa harapan dalam dilakukannya penelitian ini, salah satunya adalah dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak, baik dilihat dari kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.



### **1.5.1. Kegunaan Teoritis**

- a. Dengan dilakukannya penelitian ini besar harapan mampu menyumbangkan pengetahuan serta kontribusi pemikiran baru khususnya diranah Administrasi Publik.
- b. Hasil riset ini semoga bisa menjadi dokumen akademik yang bermanfaat bagi sivitas akademika.

### **1.5.2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilaksanakan sebagai implementasi pengetahuan yang telah didapat selama peneliti menempuh pendidikan sehingga bermanfaat untuk penguatan intelektual dan perluasan wawasan.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini semoga bisa menjadi masukan bagi Puskesmas Pagerageung untuk terus konsisten menjalankan program inovasi dan menjadi bahan evaluasi mengenai beberapa kekurangan yang ada. Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya untuk senantiasa mendorong serta membantu supaya program inovasi ini bisa terus aktif dan membantu meminimalisir permasalahan. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk lebih responsif dalam mengatasi sejumlah hambatan dalam pelaksanaan program.

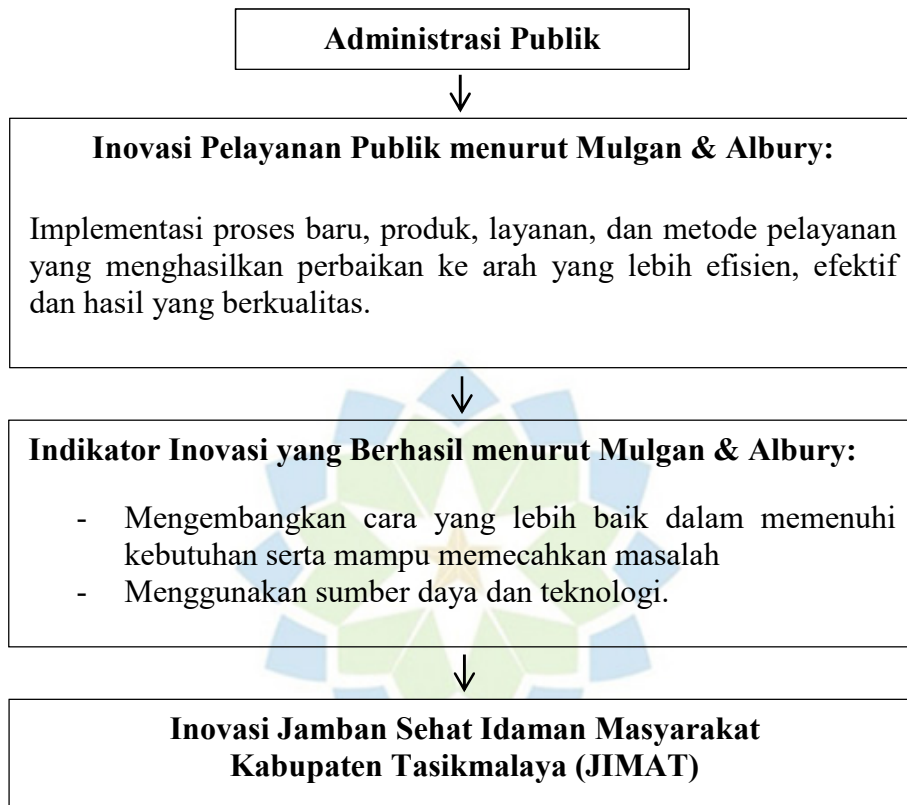
c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini semoga bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi serta motivasi bagi masyarakat sekitar khususnya dan umumnya seluruh masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

## 1.6. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui penerapan inovasi pelayanan publik di UPTD Puskesmas Pagerageung Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya, maka peneliti menggunakan teori dari Geof Mulgan dan David Albury bahwa menurut mereka, inovasi adalah implementasi proses baru, produk, layanan, dan metode pelayanan yang menghasilkan perbaikan ke arah yang lebih efisien, efektif dan hasil yang berkualitas. Dan inovasi sektor publik dikatakan berhasil jika mampu mengembangkan cara yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan menggunakan sumber daya dan teknologi (Mulgan & Albury, 2003). Kedua indikator tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan secara spesifik, yang mana keduanya merupakan permasalahan yang bersifat positif.

Munculah kerangka pemikiran untuk mendukung penelitian ini yang diolah menjadi sebuah bagan sebagai berikut:



**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG